

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut edi suharto(2009) pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

- a) Memenuhi kebutuhan kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan(*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebasdari kelaparan, bebas dari krbodohan, bebas dari kesakitan.
- b) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dalam memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- c) berpartisipasi di dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Untuk memberdayakan masyarakat diperlukan pendekatan utama adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan sebagai obyek melainkan subyek dari berbagai upaya pembangunan oleh karena itu Kartasasmita (1997:29) mengatakan pemberdayaan harus mengikuti pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

1. Upaya pemberdayaan harus terarah (targetet)

2. Program pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran
3. Menggunakan pendekatan kelompok

Kemudian kartasmita mengatakan (1997:24) mengatakan upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari 3 sisi yaitu :

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Ketiga, membedakan mengandung pula arti melindungi. Menurut Lowe dalam bukunya I. Nyoman Sumaryady Pemberdayaan adalah suatu proses sebagai akibat dari mana individu memiliki otonomi, motivasi dan ketrampilan yang di perlukan untuk melaksanakan pekerjaan mereka dalam suatu cara yang memberikan mereka rasa kepemilikan dan keperluan mencapai tujuan-tujuan bersama organisasi.

Sedangkan menurut Parsons, et.al (Suharto; 2010:58-59) mengatakan pengertian pemberdayaan adalah sebagai berikut: Pemberdayaan adalah sebuah proses yang mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian sertalembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dalam kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Pemberdayaan menunjukan pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk memiliki akses terhadap sumber-

sumberproduktifyang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Sulistiyani (2004:77) secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau kekuatan/kemampuan kepada pihak yang belum berdaya.

Menurut Widjaja (2003:182) pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri sebagai mandiri dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Pemberdayaan tidak cukup hanya dengan meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama, namun juga diikuti oleh perubahan struktur sosial ekonomi melalui peningkatan peran, produktivitas, memberi kesempatan usahayang sama, namun juga harus diikuti dengan perubahan stuktur sosialekonomi, mendukung perkembangan struktur kehidupan sosial ekonomi, melalui peningkatan peran, produktivitas, efisiensi serta perbaikanterhadap akses sumberdaya, teknologi pasar dan terhadap sumber pembiayaan.selanjutnya Ahmad Mahmudi, menyatakan

pemberdayaan adalah proses penumbuhan kekuasaan dan kemampuan diri dari kelompok masyarakat yang miskin/lemah terpinggirkan dan tertindas.

Beragam definisi pemberdayaan menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah pada masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Hakikat pembangunan adalah upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut diperjelas dalam pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan kemerdekaan yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian pembangunan nasional diharapkan mampu menuju pada keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat (Sudjana, 2004: 148). Kemiskinan merupakan salah satu dampak negatif dari pembangunan. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan perubahan semua pihak secara

bersama dan terkoordinasi. Secara umum, kemiskinan adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang atau kelompok masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (Agnes Sunartiningsih, 2004: 80).

Jebakan kemiskinan yang membelenggu penduduk miskin sebagai akar segala ketidakberdayaan telah menggugah perhatian masyarakat dunia, sehingga isu kemiskinan menjadi salah satu isu sentral dalam Millenium Development Goals atau MDGs (UNDP, 2003 dalam Faturachman, dkk., 2007). Kemiskinan diyakini sebagai akar permasalahan hilangnya martabat manusia, hilangnya keadilan, belum terciptanya masyarakat madani, tidak berjalannya demokrasi, dan terjadinya degradasi lingkungan (Faturachman, dkk., 2007). Terkait dengan kemiskinan, isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah masih relatif banyaknya jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk yang relatif banyak ini terutama dikaitkan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pengentasannya, baik melalui pendanaan oleh pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Namun demikian, upaya yang sedemikian tinggi kuantitasnya tersebut belum secara signifikan dapat mengentaskan kemiskinan. Hal ini dapat dilihat pada data Kementerian PPN/Bappenas diketahui tingkat kemiskinan 2009-2017 kemiskinan di desa lebih tinggi dari perkotaan. Pada september 2017 kemiskinan di pedesaan sebesar 13, 47 persen atau secara absolut 16, 31 juta jiwa, sedangkan di perkotaan 7, 26 persen atau secara absolut 10, 27 juta jiwa. Apabila keadaan ini ditarik ke Provinsi Nusa Tenggara Timur yang jumlah penduduk 5, 3 juta

jiwa dan jumlah penduduk miskin 1.150, 79 jiwa, dan pada Kabupaten Malaka, jumlah penduduk miskin di Kabupaten malaka pada tahun 2017 tingkat kemiskinan sebesar 31, 14 persen dari jumlah penduduk malaka 186.622 jiwa.Sedangkan pada Desa Alas selatanjumlah penduduk 2.732 jiwa yang sebagian besar masyarakat Desa Alas selatanmasih berada pada garis kemiskinan.

Hal demikianpunterjadi di Kabupaten malakakhususnya di desa Alas selatan.Sebagaimana telah dijelaskan dalam data yang diperoleh bahwasampai dengan akhir tahun 2017, jumlah keluarga miskin di Kabupaten Malaka adalah sebesar 31, 14 persen.Tingginya angka kemiskinan tersebut telah menjadi perhatian serius pemerintah khsususnya di desa Alas selatan Kecamatan Kobalima Timur.

Memperhatikan kegagalan berbagai program penanggulangan kemiskinan maka, Dinas sosial dengan semangatnya merasa perlu mengembangkan strategi dan alternatif penanganan kemiskinan yang berpihak pada rakyat miskin.Berpihak pada rakyat miskin dapat diartikan bahwa masyarakat miskin diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menentukan apa yang akan dijalankan dalam upaya mengangkat keluar dari garis kemiskinan.Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah KabupatenMalaka mencanangkan Program KUBE.Progaram ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peciptaan kesempatan kerja yang fokus pada pengembangan usaha ekonomi produktif.

Seperti yang kita ketahui bersama, masyarakat yang disebut tidak berdaya lebih banyak dialami oleh masyarakat dipedesaan. Ketidak berdayaan disini dimaksudkan bahwa masyarakat belum mampu untuk melakukan segala hal dipedesaan seperti berwira usaha, mendapatkan pekerjaan dan membuka lapangan pekerjaan. Faktor yang menyebabkan ketidak berdayaan tersebut adalah faktor dari kurangnya sentuhan dari pemerintah. Misalnya masih kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui program-program yang dibentuk pemerintah dalam menegatas kemiskinan masyarakat desa khususnya di desa Alas selatan yang berdampak pada kurang partisipasi masyarakat dalam menjalankan program yang dicanangkan pemerintah sehingga program tersebut terkesan hanya diketahui oleh sebagian orang saja.

Di desa Alas selatan , masalah kemiskinan bukanlah merupakan masalah yang baru sehingga dengan adanya program KUBE ini memacu masyarakat desa yang tergabung dalam kelompok dan dapat menambah modal usaha kelompok. Adapun penduduk desa Alas selatan 2.732 jiwa dengan jumlah penduduk miskin 251 KK, yang mana 100 kk bergabung dalam 10 kelompok usaha KUBE yaitu kelompok sinar haeain , kelompok sinar saluhu, kelompok sinar haslot, kelompok sinar mahkota, kelompok putra malaka , kelompok lakateu , kelompok taramasik jaya, kelompok briakama , kelompok Sinar pagi, kelompok sinar weluli. Setiap kelompok terdiri dari 10 orang dan memperoleh dana Program KUBE yang ditetapkan Kementrian Sosial untuk setiap kelompok sebesar **RP.20.000.00**

Tabel 1.1

Daftar Nama-nama kelompok usaha bersama KUBE yang menerima dana
Desa Alas selatan, kecamatan Kobalima Timur tahun 2017

NO	NAMA KELOMPOK	ANGGOTA	JENIS USAHA	DANA YANG DIPEROLEH
1	SINAR HAEAIN	10 orang	Tanaman Pangan	Rp. 20.000.000
2	SINAR SALUHU	10 orang	Tanaman Pangan	Rp.20.000.000
3	SINAR HASLOT	10 orang	Jambu mente	Rp.20.000.000
4	SINAR MAHKOTA	10 orang	Kelapa	Rp.20.000.000
5	PUTRA MALAKA	10orang	Sayur-mayur	Rp.20.000.000
6	LAKATEU	10 orang	Sayur-mayur	Rp.20.000.000
7	TARAMASIK JAYA	10 org	Tanaman pangan	Rp.20.000.000
8	BRIAKAMA	10 orang	Sayur-mayur	Rp.20.000.000
9	SINAR PAGI	10 orang	Ternak ayam	Rp.20.000.000
10	SINAR WELULI	10 orang	Tanaman pangan	Rp.20.000.000

Data: pengelolaan KUBE 2018

Kelompok usaha yang dibentuk di atas semuanya berjalan, namun tidak semua anggota kelompok berperan aktif yang mana setiap anggota kelompok belum mengetahui dan memaknai mengenai program KUBE. Hal

ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi, dan setiap anggota kelompok masih berpenghasilan dari bertani dan berternak. pelaksanaan pertanian mendapatkan dana untuk dikembangkan sebagai usaha dalam menegasi kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan hidup.

Keberhasilan suatu desa tentunya tidak terlepas adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat, sehingga tiap program yang dijalankan akan mampu mewujudkan tujuan dan sasaran yang di harapkan.

Dari kenyataan ini pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang urgen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan sebagai upaya mengembangkan dan menguatkan masyarakat agar bisa mandiri dalam menembangkan potensi yang dimilikinya. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi keluarga miskin di wilayah tersebut dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan memfasilitasi masyarakat melalui program keterampilan yang tepat. Salah satu tujuan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah membantu memberdayakan masyarakat, terutama masyarakat miskin yang perlu disehatkan. Proses pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang diadakan di Desa Alas Selatan dalam upaya membantu masyarakat meningkatkan kualitas hidup, maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai **Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Desa Alas Selatan Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka**

1.2 Perumusan Masalah

Untuk memiliki arah yang menginterpretasikan fakta dan data kedalam penulisan skripsi, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: *“Bagaimanakah pemberdayaan masyarakat melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)?”*

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisa Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Alas selatan Kec. Kobalima Timur Kabupaten Malaka

1.4 Manfaat Penelitian

a. Akademis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh cakrawala dan wawasan pengetahuan yang lebih mendalam tentang pemberdayaan masyarakat melalui program KUBE, di desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur

b. Praktis:

- Secara praktis sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata-1 di lembaga Universitas Khatolik Widya Mandira , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

- Hasil penelitian ini di harapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur dalam pelaksanaan tugas.
- Menjadi referensi bagi peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian lain